

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, A.Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Cetakan I. Jakarta: Pradnya Paramita.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cet. I, Jakarta: Gramedia.

Dwiyanto, Agus. 2003. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK UGM.

Ekawati, Evy Lusia. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Genta Press

Fadjar, A. Mukthie. 2005, *Tipe Negara Hukum*, Cetakan II. Malang: Bayumedia Publishing

Gadjong, Agus Salim Andi. 2007. *Pemerintah Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hadjon, Philipus M. 1998. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga.

Hadjon, Philipus M (dkk). 2019. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. 13. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ilmar, Aminuddin. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas, Universitas Hasanuddin.

-----, 2020, *Memaknai Kepemerintahan Yang Baik Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola Dan Keabsahan Tindakan Pemerintahan*. Makassar: Phinatama Media.

Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.

Jusuf, Muhammad. 2014. *HUKUM KEJAKSAAN: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia.

Kusdarini, Eny. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: Ull Press.

Kusdarini, Eny. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Ed. 1, Yogyakarta: UNY Press.

Marbun, Sf. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

----- (dkk), 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Ull Press.

Maringka, Jan S. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

----- . 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

MD, Moh. Mahfud. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moenek, Reydonnyzar & Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.

Nofianti, Leny. 2015. *Ringkasan Buku Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*. Pekanbaru.

Ridwan, H.R. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Santosa, Pandji. 2022. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Cet. 5. Refika Aditama: Bandung.

Setya, Cekli, et al. 2017. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Tata Usaha Negara*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Judicial Sector Support Program, Jakarta.

Surachman, RM dan Andi Hamzah. 1995. *Jaksa diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Grafika.

Tim MaPPI-FHUI. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tirtaadmijaya, M.H. 2005. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Jakarta: Fasco.

Yusdiansyah, Efik. 2010. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

Artikel

Faniyah, Iyah dan Azman Tanjung. Desember 2022. *Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman pada Proyek Strategis untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum*. Unes Law Review, Volume 5, Issue 2.

Mahandari, Dita dan I Nyoman Gede Remaja. 2019. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Masalah Hukum Pemerintah Daerah*. Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1.

Maryam, Neneng Siti. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI No. 1.

Putri, Zhaudiva Azzahra dan Rahayu Subekti. 2022. *Teori Legislasi dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 1.

Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama. 2018. *Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*. Mimbar Hukum: Volume 30, Nomor 2, Juni .

Rasul, Sjahruddin. 2009. *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Mimbar Hukum: Volume 21, Nomor 3, Oktober.

Salmande, Ali. 2013. *Tata Usaha Negara dan Permasalahannya*. Jakarta: MaPPI FH UI.

Dokumen

Management Development and Governance Division, Document, "UNDP and Governance: Experience and Lessons Learned", United Nations Development Program, New York, January 1998.

Naskah Akademik mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tahun 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986
Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

Website

<https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kata-ombudsman-jaksa-tp4d-bagian-dari-masalah>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116111216-12-465849/jaksa-agung-resmi-bubarkan-tp4-pusat-dan-daerah>

<https://korankaltara.com/tp4d-dibubarkan-pengawasan-kejaksanaan-tetap-jalan>